BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi menjadi tolak ukur keadaan perekonomian suatu wilayah, mencakup struktur ekonomi dan pengurangan ketimpangan pendapatan antara penduduk serta antar daerah, di mana setiap wilayah berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi. Perbedaan pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak pada tingkat kesejahteraan daerah, yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah, dengan kata lain ketimpangan pendapatan suatu daerah akan semakin besar. Permasalahan terkait ketimpangan salah satunya ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang ada di setiap negara dan merupakan permasalahan yang berkelanjutan sehingga menjadi permasalahan yang harus segera diatasi (Caesarisma & Hamrullah, 2023).

Ketimpangan pendapatan muncul ketika tidak ada upaya untuk pemerataan pembangunan ekonomi, yang mengakibatkan perbedaan antara wilayah yang maju dan yang terbelakang atau kurang maju menjadi semakin jelas. Interaksi antar wilayah sering terjadi dan tidak dapat dihindari, karena merupakan salah satu unsur tata ruang yang menjadi salah satu penyebab yang harus diperhatikan dalam menentukan keadaan suatu wilayah.

Menurut Alisjahbana (2005) mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang menonjol di Indonesia sering kali dikaitkan dengan kesenjangan antar daerah, yang secara signifikan dipengaruhi oleh terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di pulau Jawa dan Bali. Artinya pengaruh antar wilayah di pulau-pulau Indonesia kurang pemerataan dan hampir seluruh sektor terutama ketersediaan sarana publik, pendidikan, dan kesehatan masih sangat kurang di Indonesia Timur.

Kawasan Indonesia Timur belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu gambaran nyata dari tantangan tersebut. Beberapa wilayah mungkin telah mencatatkan kemajuan

cepat, tetapi banyak lainnya masih bergulat dengan kemiskinan. Konteks ini, ketimpangan pendapatan tidak hanya menjadi permasalahan tetapi juga sosial.

Ketimpangan ini tidak hanya terisolasi di satu wilayah. Dalam dunia yang semakin terhubung, baik secara ekonomi maupun geografis, ketimpangan pendapatan bisa saja mencerminkan pola-pola hubungan antarwilayah. Kawasan Indonesia Timur kerap menjadi sorotan terkait masalah ketimpangan di Indonesia (Rosmeli & Nurhayani, 2014). Secara geografis, Provinsi-Provinsi dan kabupaten/kota di kawasan ini memiliki lokasi yang berdekatan, sehingga menciptakan hubungan spasial antar daerah. Hubungan ini, yang dikenal sebagai autokorelasi spasial, menggambarkan bagaimana kondisi suatu wilayah dapat memengaruhi wilayah lain dalam radius tertentu. Kondisi sifat suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh wilayah yang saling berdekatan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Tobler, 2004) segala sesuatu saling terkait satu sama lain, tetapi hal-hal yang dekat lebih saling terkait daripada hal-hal yang jauh.

Keterkaitan antarwilayah ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal suatu daerah, tetapi juga oleh dinamika yang terjadi di wilayah sekitarnya. Hubungan spasial semacam ini dapat memberikan gambaran yang lebih kompleks mengenai bagaimana ketimpangan terbentuk dan berkembang (Capello & Cerisola, 2024).

Ketimpangan pendapatan adalah salah satu isu yang rumit dan menjadi perhatian utama di wilayah seperti Kawasan Indonesia Timur. Menurut Aisyah *et al.*, (2023) ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari perbedaan penghasilan antar individu, tetapi juga dari distribusi kekayaan, peluang, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketimpangan yang tinggi dapat berdampak buruk pada stabilitas sosial dan ekonomi dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Sumber : BPS, 2024

Gambar 1. 1 Ketimpangan Pendapatan Kawasan Indonesia Timur Tahun 2022-2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa variasi tingkat ketimpangan antar wilayah di Kawasan Indonesia Timur, di mana Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua menunjukkan ketimpangan tertinggi dengan indeks mendekati 0,45, sedangkan Maluku memiliki ketimpangan yang lebih rendah dengan indeks di bawah 0,35. Sebagian besar wilayah mengalami sedikit penurunan ketimpangan dari tahun 2022 ke 2023, meskipun beberapa daerah, seperti Sulawesi Barat dan Papua Barat, menunjukkan stagnasi. Masalah utama yang dihadapi adalah masih tingginya ketimpangan di beberapa wilayah.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di kawasan Indonesia Timur masih tinggi mengisyaratkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi belum merata, sehingga pertumbuhan ekonomi belum dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Secara sudut pandang ekonomi spasial, ketimpangan akibat pola pembangunan yang tidak seragam adalah hal yang wajar dalam memunculkan wilayah yang tertinggal atau tumbuh lebih lambat, namun pola tersebut mengakibatkan perbedaan mendasar secara pendapatan hingga gan antar wilayah (Nazipawati, 2019).

etimpangan pendapatan merupakan hasil dari berbagai faktor, nya yaitu perbedaan pendapatan tenaga kerja dan akses yang tidak erhadap modal manusia. Dalam teori modal manusia, pekerja memiliki

kapasitas berbeda dalam berkontribusi terhadap produksi berdasarkan keterampilan, pendidikan dan pengalaman. Hal tersebut dapat memengaruhi distribusi upah sebagai cerminan nilai tambah pekerja dalam proses produksi (Piketty, 2015).

Sumber : BPS, 2024

Gambar 1. 2

**Data PDRB Menurut Provinsi di Kawasan Indonesia Timur tahun 2022-2023
(Milyar Rupiah)**

Ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Timur masih menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan data PDRB yang disajikan pada gambar 1.2 menunjukkan perbandingan kontribusi ekonomi antar provinsi di Kawasan Indonesia Timur untuk tahun 2022 dan 2023, dengan Sulawesi Selatan mencatatkan PDRB tertinggi. Angka ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan ini, berkat potensi sumber daya alam dan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan provinsi lainnya. Sebaliknya, provinsi seperti Gorontalo dan Maluku Utara menunjukkan PDRB yang rendah, mencerminkan tantangan dalam pengembangan ekonomi mereka.

Provinsi Papua dan Papua Barat juga menunjukkan angka PDRB yang tinggi, tetapi masih jauh di bawah Sulawesi Selatan. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, tantangan dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya menghambat pertumbuhan yang merata. Ketimpangan ini menegaskan perlunya perhatian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan

ekonomi agar pertumbuhan dapat lebih inklusif. Tren pertumbuhan di beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Tengah, menunjukkan adanya peningkatan PDRB, meskipun belum cukup untuk mengurangi ketimpangan. Menurut Christina *et al.*, (2017) Perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh interaksi antara wilayah pusat (*core region*) dan wilayah pinggiran (*hinterland*), sebagaimana dijelaskan dalam model hubungan antara keduanya. Interaksi antarwilayah dalam konteks ekonomi mencakup aliran barang, keterkaitan dalam proses produksi, pergerakan modal, dan migrasi tenaga kerja. Hubungan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap wilayah sekitarnya, khususnya dalam mendukung pemerataan pembangunan.

Selain itu, hubungan antarwilayah di kawasan Indonesia Timur menghadapi tantangan signifikan karena jarak antar pulau yang relatif jauh dan terbatasnya mobilitas barang dan jasa. Oleh karena itu, peningkatan konektivitas transportasi dan pembangunan infrastruktur pendukung sangat diperlukan. Upaya ini harus mencakup pengembangan jalur darat, laut, dan udara untuk memastikan perekonomian dapat berjalan secara optimal tanpa memperburuk ketimpangan di daerah-daerah dengan akses yang sulit dijangkau (Mustakim *et al.*, 2017).

Ketimpangan distribusi pendapatan erat kaitannya dengan faktor demografis, ketenagakerjaan, dan jumlah penduduk, yang menjadi penyebab utama meningkatnya ketimpangan tersebut. faktor penyebab ketimpangan yaitu perbedaan kondisi demografis, kandungan sumber daya alam, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah (Andiny *et al.*, 2019).

Jika merujuk pada teori U-terbalik Kuznets mengemukakan bahwa pada fase awal pembangunan, biasanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai dengan distribusi pendapatan yang semakin timpang namun pada fase pembangunan berikutnya kondisi ketimpangan distribusi pendapatan cenderung membaik (Todaro & Smith, 2018). Dalam teori ini relevan untuk menjelaskan ketimpangan antarwilayah, di mana wilayah yang lebih maju secara ekonomi cenderung mengalami peningkatan disparitas pendapatan dengan wilayah a pada tahap awal pembangunan.

amun, seiring dengan kemajuan konektivitas antarwilayah dan distribusi laya yang lebih merata, ketimpangan tersebut dapat berkurang. Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menjadi salah satu faktor yang memperumit permasalahan ketimpangan pendapatan, khususnya di negara-negara berkembang (Seo *et al.*, 2020; Tamasauskiene & Dilius, 2020). Ketika pertambahan jumlah penduduk tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini dapat memperparah ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan sumber daya ekonomi akan semakin memperburuk ketimpangan (Castells & Royuela, 2014)

Sumber : BPS, 2024

Gambar 1. 3 Jumlah penduduk Kawasan Indonesia Timur tahun 2021-2023 (Ribu Jiwa)

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat pertumbuhan jumlah penduduk di 13 Provinsi yang ada di Kawasan Indonesia Timur pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan. Maka dari itu apabila pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan akan menyebabkan menurunnya pendapatan perkapita khususnya pada negara berkembang yang mengakibatkan kesenjangan distribusi pendapatan (Anggina & Artaningtyas, 2017). Di negara berkembang

hasilan rendah, ketimpangan pendapatan terkait dengan dampak negatif pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Tabassum & Majeed, 2008). juga menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan global akan

mencapai titik terendah sekitar 2027, kemudian meningkat kembali akibat pengaruh ekonomi dan demografi (Rougoor, 2015).

Sumber : BPS, 2024

Gambar 1.4 Penanaman Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kawasan Indonesia Timur tahun 2021-2023 (Milyar Rupiah)

Gambar diatas menunjukkan investasi dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto di 13 Provinsi di Kawasan Indonesia Timur. Secara keseluruhan, beberapa provinsi menunjukkan peningkatan nilai PMTB dari tahun ke tahun. Salah satu faktor dalam pembangunan ekonomi yaitu dengan investasi. Investasi memberikan manfaat terhadap sumber daya yang ada dan juga dapat memperlebar kesempatan kerja (Jhingan, 2012). Maka dari itu investasi dapat berupa segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha dalam suatu wilayah (Mankiw, Gregory, 2007) . Investasi dapat meningkatkan kemampuan produksi suatu wilayah, hal ini dikarenakan bertambahnya modal yang masuk akan meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa, dengan meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang positif pada suatu wilayah merupakan baik (Royan *et al.*, 2019).

Sumber : BPS, 2024

Gambar 1.5 Produktivitas Tenaga Kerja di Kawasan Indonesia Timur tahun 2021-2023 (Juta/Rp)

Pada gambar 1.5 dapat dilihat produktivitas tenaga kerja di Kawasan Indonesia Timur pada tahun 2021-2023. Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan yang relevan dalam produktivitas tenaga kerja antar provinsi, dengan Bali dan NTB menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain.

Produktivitas tenaga kerja juga dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan. Produktivitas tenaga kerja merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan standar hidup masyarakat (Williams *et al.*, 2003). Dengan demikian produktivitas tenaga kerja dapat digambarkan dengan output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada tahun tertentu, sehingga semakin tinggi produktivitasnya menandakan tenaga kerja semakin produktif.

Berdasarkan *teori Human Capital* bahwa bahwa pendidikan adalah bentuk investasi yang menghasilkan pengembalian dalam bentuk peningkatan pendapatan dan produktivitas yang dapat mempengaruhi keetimpangan pendapatan. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang merata menjadi krusial dalam mengatasi ketimpangan pendapatan.

Sumber : BPS, 2024

Gambar 1.6 Rata-Rata Lama Sekolah di Kawasan Indonesia Timur tahun 2021-2023 (Tahun)

Pada gambar diatas disajikan rata-rata lama sekolah setiap Provinsi di Kawasan Indonesia Timur pada tahun 2021-2023 menunjukkan adanya variasi dalam rata-rata lama sekolah antar provinsi. Beberapa provinsi menunjukkan peningkatan yang konsisten, sementara yang lain mungkin mengalami stagnasi atau penurunan dalam periode yang sama.

Beberapa studi menunjukkan bahwa distribusi pendidikan yang lebih merata secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan (Hall, 2018; Lee & Lee, 2018). Kualitas dan kuantitas pendidikan berperan dalam mengurangi ketimpangan ini, dengan efek marginal yang lebih kuat pada peningkatan tingkat pendidikan (Hall, 2018). Selain itu, pendidikan juga memengaruhi dua kutub distribusi pendapatan, yakni mengurangi bagian pendapatan kelompok kaya dan meningkatkan bagian pendapatan kelompok berpenghasilan rendah (Abdullah *et al.*, 2015).

Dengan demikian, untuk menanggulangi permasalahan ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Timur pemerintah perlu melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk meratakan pembangunan serta atkan transaksi perdagangan antar wilayah sekitarnya. Hal ini penting

agar pertumbuhan output, tenaga kerja, dan investasi dapat dirasakan tidak hanya oleh satu wilayah, tetapi juga oleh daerah-daerah di sekitarnya. Interaksi antar wilayah dalam ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah penduduk, investasi, produktivitas tenaga kerja dan pendidikan. Tindakan ini menjadi tantangan yang signifikan, mengingat pentingnya perencanaan wilayah bagi pengambil kebijakan dalam mendorong pengembangan ekonomi yang terstruktur dan berkelanjutan, demi peningkatan kesejahteraan serta perbaikan kualitas hidup masyarakat (Sangkala *et al.*, 2019)

Terdapat sudut pandang dalam temuan penelitian yang dilakukan oleh (Irina *et al.*, 2023) mengemukakan bahwa Pola investasi mengungkapkan bahwa daerah sering bersaing untuk mendapatkan sumber daya, tetapi inovasi jangka panjang dapat menyebabkan efek limpahan positif di daerah tetangga, dimana daerah-daerah yang lebih berkembang cenderung lebih mampu menarik investasi, sehingga meningkatkan pendapatan dan memicu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Dinamika ekonomi di suatu daerah dapat memengaruhi daerah tetangga melalui efek spillover, yang dapat bersifat positif (*spread effect*) atau negatif (*backwash effect*). Efek positif terjadi ketika kemajuan ekonomi di suatu wilayah memberikan manfaat bagi wilayah sekitar, sedangkan efek negatif terjadi ketika perkembangan ekonomi di satu wilayah justru memperburuk kondisi ekonomi wilayah lain (Galuh Nilam Sari & Mohammad Wahed, 2023).

Ketimpangan pendapatan adalah permasalahan yang menjadi isu penting di kawasan Indonesia Timur, dengan demikian perlunya penelitian yang mengulas faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan di wilayah kawasan Indonesia Timur. Penelitian ini memanfaatkan analisis spasial untuk mengidentifikasi hubungan ketimpangan pendapatan di berbagai wilayah di Indonesia Timur. Metode ini sangat penting untuk memberikan informasi mengenai pola penyebaran serta hubungan antara wilayah tersebut dengan wilayah lain yang dianalisis. Semakin dekat jarak antar lokasi, semakin besar potensi dampak yang ditimbulkan, dan ada kemungkinan bahwa lokasi-lokasi tersebut saling memengaruhi (Anselin, 1955).

alam konteks pengembangan wilayah, hasil yang diperoleh dari analisis dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik melakukan

penelitian dengan judul “**Analisis Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Indonesia Timur**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka uraian rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Penduduk, Investasi, pendidikan melalui produktivitas tenaga kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh spasial Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Indonesia Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Penduduk, Investasi, pendidikan melalui produktivitas tenaga kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Timur.
2. Untuk menganalisis pola spasial Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Indonesia Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini maka hasil yang diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian topik yang serupa.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai refrensi dan pertimbangan oleh pengambil kebijakan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Ketimpangan Pendapatan

Fenomena hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan pertama kali diperkenalkan oleh Simon Kuznets pada 1955. Dari hasil penelitiannya, Simon Kuznets melahirkan sebuah gagasan baru bahwa pembangunan di suatu negara pada batas-batas tertentu dapat memicu timbulnya ketimpangan ekonomi.

Kuznets menyampaikan bahwa pada awal proses pembangunan, distribusi pendapatan cenderung tidak merata. Selanjutnya ketika tercapainya tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan kemudian menjadi lebih merata. Terdapat implikasi bahwa pada jangka pendek, terjadi hubungan positif pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, berarti pertumbuhan ekonomi menyebabkan kenaikan ketimpangan pendapatan. Meski demikian, pada jangka panjang hubungan tersebut berubah menjadi negatif, mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan mampu menurunkan ketimpangan pendapatan (Putri & Aminda, 2024).

Hipotesis U terbalik didasarkan pada teori dari W.A Lewis mengenai perpindahan penduduk dari pedesaan (pertanian) ke perkotaan (industri). Daerah pedesaan yang sangat padat penduduknya mengakibatkan tingkat upah disektor pertanian sangat rendah, sedangkan diperkotaan tingkat upah relatif tinggi karena jumlah penduduk atau tenaga kerjanya relatif sedikit dan membuat suplai tenaga kerja dari pertanian ke industri tidak terbatas. Proses perpindahan tenaga kerja ini akan terus berlangsung dan pada fase terakhir, pada saat sebagian besar dari tenaga kerja yang berasal dari pertanian telah diserap oleh industri, perbedaan pendapat per kapita antara di pedesaan dan perkotaan menjadi kecil atau tidak ada lagi (Tambunan, 2016).

Ahli ekonomi sering tertarik pada distribusi pendapatan di antara rumah dalam suatu negara. Alih-alih ekonom pembangunan sering melihat konsumsi rumah tangga, biasanya diukur dengan pengeluaran rumah baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Di negara-negara yang pendapatan bisa sulit diukur, terutama bagi rumah tangga petani

subsisten yang cenderung lebih banyak mengkonsumsi daripada memasarkan sebigian besar dari apa yang mereka hasilkan (Perkins *et al.*, 2014).

Semakin tidak meratanya distribusi pendapatan, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai, disebabkan oleh peningkatan tingkat tabungan agregat yang diiringi oleh investasi yang lebih besar. Fenomena ini terjadi karena individu dengan kekayaan cenderung memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang kurang mampu. Apabila diasumsikan bahwa tujuan tunggal masyarakat adalah memaksimalkan laju pertumbuhan PDRB, maka strategi yang paling efektif adalah menciptakan pola distribusi pendapatan yang seberat mungkin. Sebaliknya, jika masyarakat mengedepankan keinginan untuk mencapai pemerataan distribusi pendapatan, maka laju pertumbuhan ekonomi diprediksi akan mengalami perlambatan (Todaro, 1989).

Rasio gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, besarnya koefisien gini tersebut menjelaskan derajat pemerataan/ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati nol) koefisiennya, semakin baik atau merata distribusinya. Sebaliknya, semakin besar koefisiennya (semakin mendekati satu) semakin semakin timpang distribusinya (Dumairy, 1999).

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor sPer.25/MEN/IX/2009 Tentang Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi, gini rasio merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan,

Rumus Gini Ratio :

$$GR = 1 - \sum fi[Y_i + Y_{i-1}]$$

Dimana : f_i = Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas i .

Y_i = Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i .

Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.

= 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang a pendapatan yang sama dengan yang lainnya.

= 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

2.1.2. Penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai penambahan jumlah populasi manusia pada suatu waktu dan bisa di hitung dalam jumlah individu atau menggunakan satuan untuk mengukur sebuah populasi. Di negara berkembang pertumbuhan penduduk bisa jadi tidak terkendali dan menyebabkan masalah ekonomi. Dalam teori *Population Trap* yang di kemukakan oleh Thomas Malthus, pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan persediaan makanan, namun karena persediaan makanan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan populasi, pendapatan per kapita akan cenderung turun sangat rendah dari tingkat pengidupan. Untuk itu cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menghindari kemiskinan absolut adalah membatasi jumlah keturunan atau pertumbuhan penduduk. (Todaro & Smith, 2018)

Dalam Teori Karl Marx dan F. Angel berpendapat bahwa populasi manusia tidak menekan makanan, kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh. Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi tingkat produktifitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahiran. Teori ini menyusun prinsip-prinsip dasar yang dianggap sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kependudukan serta korelasi ekonomi dan sosial.

Teori Modernisasi yang dikemukakan oleh Walt Rostow mengaitkan perubahan dalam struktur kependudukan dengan proses modernisasi dan pembangunan ekonomi. Proses modernisasi dianggap sebagai pendorong utama penurunan tingkat kelahiran dan kematian, seiring dengan peningkatan pendidikan, kesehatan dan standar hidup (Ghifari, C., 'Ainul, Y. A., Kurniawan, 2024). Sedangkan teori *optimum population* mengemukakan bahwa ada ukuran populasi yang optimal dimana tingkat kesejahteraan ekonomi atau produktivitas maksimum tercapai. Populasi yang terlalu besar atau kecil menyebabkan penurunan dalam kelangkaan kesejahteraan (Coleman, 2014).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Noval, 2020) jakakkn bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan cara terus menerus akan mengakibatkan masalah keterbelakangan dan in kualitas hidup di berbagai daerah dan ini akan berdampak langsung ketimpangan pendapatan karena menurunnya kesejahteraan penduduk.

2.1.3. Investasi

Investasi merupakan faktor yang paling penting guna mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan wilayah. Dalam perekonomian dikenal istilah investasi dan setiap pelaku usaha akan mencari peluang-peluang untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Nurkse menyatakan bahwa “masyarakat tidak menggunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsinya, tapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal seperti perkakas, alat-alat mesin, fasilitas angkutan pabrik dan segala dan segala macam bentuk modal nyata yang nyata dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif” (Suharlina, 2020)

Sedangkan menurut Teori Neo Klasik teori pertumbuhan ekonomi menekankan pentingnya tabungan sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat laju perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk. Makin cepat perkembangan volume stok capital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Menurut Teori Klasik bahwa investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan untuk meningkatkan produksi (Jhingan, 2004). Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Sehubungan dengan itu, maka sudah sewajarnya pemerintah melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan masuknya investasi (Wahyuni, 2010).

Harrod-Domar mengembangkan teori Keynes dengan memberi peranan kunci investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai sifat ganda yang dimiliki investasi (Sulastiawati, 2012). Pertama, investasi menciptakan pendapatan (merupakan dampak dari permintaan investasi), dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok nerupakan dampak dari penawaran investasi). Kemudian Solow dan ngoreksi Teori Harrod-Domar dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga in akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Asumsi yang

digunakan adalah skala pengembalian yang konstan (*constan return to scale*), substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) bersifat sempurna, dan adanya produktivitas marjinal yang semakin menurun (*diminishing marginal productivity*) dari tiap inputnya.

2.1.4. Produktivitas Tenaga Kerja

Menurut ILO (International Labor Organization, 2016) produktivitas tenaga kerja merupakan indikator penting untuk mengukur performa ekonomi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi sangat penting bagi perekonomian secara keseluruhan karena dapat mempertahankan daya saing global. Maka peningkatan produktivitas menjadi unsur penting menuju perekonomian yang lebih kompetitif dan sejahtera. Produktivitas tenaga kerja menggambarkan output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada tahun tertentu. Semakin tinggi produktivitasnya menandakan tenaga kerja semakin produktif.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya (Todaro, 2000).

Dalam teori Solow yang menunjukkan penurunan hasil marjinal dari investasi modal, teori ini menyatakan bahwa investasi dalam modal fisik dan modal manusia (seperti melalui pendidikan) justru dapat meningkatkan produktivitas (Bucci & Prettnner, 2020).

Menurut (Nicholson, 1994) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q=f(K,L)$ dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperhatikan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat di produksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L maka apabila

u masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap in menyebabkan tambahan keluaran yang akan di produksi. Tambahan yang di produksi inilah yang disebut dengan produksi fisik marjinal (*Physcal Product*). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga

kerja ditambah terus menerus sedangkan faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat akan memperlihatkan penurunan produktivitas serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Produktivitas merupakan salah satu indikator yang penting dalam aktivitas ekonomi. Produktivitas sebagai daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Hal ini menjadi salah satu alasan banyak negara yang berlomba-lomba dalam meningkatkan produktivitasnya. Jika produktivitas tenaga kerja masih berada pada tingkat yang rendah, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan atau pelatihan. Selain itu, perbaikan dalam tata cara kerja juga harus dilakukan, disertai dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja. Di sisi lain, apabila produktivitas tenaga kerja telah mencapai tingkat yang tinggi, maka upaya pemeliharaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa produktivitas yang telah dicapai tidak mengalami penurunan dan diharapkan dapat terus meningkat (Kemenaker, 2016).

Produktivitas tenaga kerja dapat dirumuskan :

$$\text{Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Dimana :

Output = PDRB

Input = Jumlah Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan maupun kebijakan pemerintah secara keseluruhan seperti pendidikan, keterampilan, kesehatan dan tingkat penghasilan (Simanjuntak. J. Payaman, 1985).

2.1.5. Pendidikan

Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembentukan karakter, pemikiran, dan keterampilan manusia. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pendidikan berkualitas berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara. Peningkatan dalam kualitas pendidikan, khususnya dalam literasi dan numerasi, dapat mendorong produktivitas individu dan inovasi di berbagai sektor (Hanushek, E. A., Woessmann, 2015).

Pendidikan semakin dianggap sebagai investasi jangka panjang yang penting oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dalam teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) menegaskan bahwa pendidikan adalah bentuk investasi yang menghasilkan pengembalian dalam bentuk peningkatan pendapatan dan produktivitas. Pendidikan berperan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan seseorang, yang berujung pada peningkatan nilai produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi (Constantin, 2014).

Perubahan pada modal manusia merupakan faktor dasar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (Schultz & Schultz, *n.d.*). Proses pendidikan dalam mempengaruhi distribusi pendapatan, melalui peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam bekerja. Hal tersebut akan menghasilkan pergeseran dari pekerja bergaji rendah dengan pekerja tidak terampil menjadi pekerja bergaji tinggi yang terampil, hal tersebut dapat menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi (Ahluwalia, 1976).

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Penduduk dan Ketimpangan

Ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan penduduk menjadi dua isu yang saling terkait dan terus menjadi perhatian dalam kajian ekonomi dan pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang. Pertumbuhan < yang cepat sering kali diiringi dengan tantangan besar dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang , yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan.

Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, menciptakan siklus yang sulit diputus (Voitchovsky, 2012).

Teori *Kuznets Curve* menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang belum merata (Huynh, 2024). Namun, pada tahap selanjutnya, ketika ekonomi mencapai tingkat kemajuan tertentu, ketimpangan pendapatan diprediksi akan menurun. Hal ini mencerminkan dinamika ketimpangan yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga demografi, seperti pertumbuhan populasi dan perubahan struktur social (Piketty, 2006).

Musfidar & Ma'mun (2012) bahwa jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif, baik yang sudah terlibat dalam pekerjaan maupun yang belum, dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan proporsi penduduk yang bekerja di berbagai daerah, di mana banyak yang masih bekerja di sektor pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Akibatnya, terdapat perbedaan signifikan dalam penghasilan antara individu yang bekerja di kota dan mereka yang bekerja di desa, di mana pekerja perkotaan cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Arfian *et al.*, (2022) Tingginya jumlah penduduk di suatu daerah tidak akan menimbulkan permasalahan jika produktivitas penduduk tersebut juga berada pada tingkat yang tinggi, sehingga tidak mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Namun, permasalahan akan muncul apabila jumlah penduduk yang besar disertai dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Arif & Wicaksani (2017) bahwa Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah yang tidak diimbangi dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat mengakibatkan semakin ketatnya persaingan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal ini berpotensi menyebabkan peningkatan angka pengangguran serta memperparah tingkat ketimpangan pendapatan di daerah

2.2.2. Hubungan Investasi dan Ketimpangan

Investasi memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung pada ketimpangan pendapatan, dimana menurun dan meningkatnya investasi memiliki keterlibatan yang sangat besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Jika terjadinya peningkatan pada investasi tersebut, maka bisa memperlapang peluang pekerjaan serta memperbaiki ketentraman masyarakat karena pendapatan yang didapati cenderung pulih hingga akhirnya dapat meminimalisir ketimpangan pendapatan (Febriyani, A., & Anis, 2021).

Ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi menunjukkan karena adanya investasi yang masuk jauh lebih rendah. Untuk itu, agar ketimpangan pendapatan berkurang dengan memperhatikan investasi perlu adanya peningkatan ekonomi dengan mengeluarkan modal, yang mana nantinya pengeluaran tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi serta dapat menambah modal kembali dan menciptakan profit di periode yang akan datang. Tidak hanya itu, dengan meningkatnya perekonomian tersebut, akan mengundang para investor baik dari dalam maupun luar untuk menamakan modalnya sehingga bisa mengurangi adanya kesenjangan antar Masyarakat (Triarsa, I. G. N. B., & Purbadharmaja, 2017).

Investasi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini digambarkan dengan semakin banyaknya investasi yang masuk kedalam suatu wilayah akan meningkatkan output yang dihasilkan dan berakhir pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi semakin banyaknya investasi yang masuk ke suatu wilayah justru akan menyebabkan ketidakmerataan (Sjafrizal, 2008).

investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu Investasi khususnya

swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Perbedaan inilah yang

akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi semakin lebar (Jhingan, 2014).

Menurut teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat bahwa pengaruh investasi pada pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat disimpulkan yakni investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan atau penurunan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan atau penurunan, seiring dengan peningkatan atau penurunan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan. Peningkatan atau penurunan investasi yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pendapatan antar daerah (Todaro & P, 2000).

Menurut Silalahi, Sitorus, *et al.*, (2024) bahwa investasi berpotensi untuk memperluas peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan konsekuensi dari peningkatan pendapatan yang diterima oleh individu. Dengan bertambahnya kesejahteraan masyarakat, pendapatan cenderung mengalami perbaikan, sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan.

2.2.3. Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja dan Ketimpangan

Hubungan antara produktivitas tenaga kerja dan ketimpangan regional merupakan isu yang kompleks, melibatkan faktor-faktor struktural dan geografis yang mendalam. Solow (1956) memberikan dasar bahwa wilayah dengan tingkat modal dan produktivitas yang lebih rendah seharusnya mengalami pertumbuhan yang lebih cepat karena mereka memiliki tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi (Kijek *et al.*, 2023). Namun, dalam praktiknya, banyak wilayah tertinggal yang tidak mampu mengejar ketertinggalan mereka akibat hambatan seperti akses yang terbatas terhadap teknologi, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas saja tidak cukup untuk mengurangi

gan regional tanpa didukung oleh kebijakan yang memastikan distribusi yang lebih merata (Martin, 2008).

Teori Konvergensi Regional, yang dibahas oleh Barro & Sala-i-Martin (1992), memperkuat gagasan bahwa wilayah yang lebih miskin seharusnya tumbuh lebih cepat daripada wilayah yang lebih kaya, yang pada akhirnya akan menyempitkan kesenjangan pendapatan. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa konvergensi ini tidak terjadi secara merata, terutama di negara-negara berkembang. Ketimpangan regional tetap menjadi tantangan signifikan karena banyak wilayah yang terperangkap dalam kondisi stagnan, tidak mampu memanfaatkan modal dan teknologi secara efektif untuk mendorong pertumbuhan produktivitas (Enflo & Missiaia, 2020).

Lebih lanjut, konsep New Economic Geography (NEG) yang diperkenalkan oleh Krugman (1991) menyoroti bagaimana pengelompokan ekonomi di wilayah tertentu dapat meningkatkan produktivitas melalui skala ekonomi dan inovasi. Meskipun ini menguntungkan wilayah yang maju, dinamika ini juga dapat memperburuk ketimpangan regional, karena wilayah yang kurang berkembang semakin tertinggal (Duan *et al.*, 2010). Tanpa intervensi kebijakan yang efektif, seperti redistribusi sumber daya dan investasi infrastruktur di wilayah tertinggal, ketimpangan produktivitas dan pendapatan antar wilayah akan terus melebar, memperburuk ketidakadilan ekonomi di berbagai tingkat regional. Bryson & Forth (2015) menambahkan bahwa di Inggris, produktivitas yang stagnan atau menurun telah memperlebar kesenjangan upah antara pekerja dengan keterampilan tinggi dan rendah. Schneider (2018) alokasi pekerja ke perusahaan dengan produktivitas rendah memperburuk ketimpangan pendapatan. Empirinya, data menunjukkan bahwa penurunan produktivitas di Inggris berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan sebesar 12,3% dibandingkan dengan tren sebelumnya (Disney *et al.*, 2013).

Sadarmayanti (2009) mengemukakan bahwa Peningkatan produktivitas memiliki potensi untuk berkontribusi pada peningkatan standar hidup melalui peningkatan output, yang pada gilirannya berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan dalam produksi.

2.2.4. Hubungan Pendidikan dan Ketimpangan

Pendidikan merupakan jembatan penghubung untuk segala permasalahan negara. Adanya keterbatasan dalam hal pendidikan akan menyebabkan terhambatnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Sanz, R., Peris, J. A., & Escámez, 2017).

Berdasarkan hal tersebut terdapat tiga alasan investasi di bidang pendidikan. Pertama, pendidikan dapat meningkatkan produktivitas pendapatan di bidang pertanian dan membantu menyerap tenaga kerja ke dalam industri modern. Kedua, investasi pendidikan dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan. Ketiga, distribusi kesempatan pendidikan bisa digunakan sebagai alat redistribusi pendapatan. Uraian di atas menjelaskan bahwa pendidikan erat sekali hubungannya dengan ketimpangan pendapatan (Danim, 2004).

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan terjadikarena adanya over-education, interaksi antara kemampuan dan pendidikan, serta perbedaan kualitas pendidikan. Sekolah atau jurusan (bidang studi) antar wilayah pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan (Wahyuni & Ribut Nurul Tri dan Monika, 2016).

Shahpari, G. & Davoudi (2013) mengungkapkan bahwa penambahan modal manusia (tingkat rata-rata sekolah tenaga kerja) dapat membuat distribusi pendapatan merata dalam jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut, apabila pendidikan meningkat, maka akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, umumnya akan memperoleh pendapatan yang tinggi dibanding dengan mereka yang berpendidikan rendah. Jarak kesenjangan pendapatan antar orang dapat dikurangi dengan pendapatan yang tinggi.

Menurut Yang & Qiu (2016) mengemukakan bahwa faktor-faktor seperti kemampuan bawaan dan investasi keluarga dalam pendidikan awal berperan penting dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan dan mobilitas antargenerasi. Pendidikan yang lebih tinggi sering dikaitkan dengan tingkat dan pendidikan yang ditempuh individu, sementara keterbatasan akses pendidikan dapat menghambat pengembangan potensi manusia secara optimal. Yang menempuh pendidikan tinggi cenderung memiliki peluang lebih untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi,

sehingga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, peningkatan akses dan mutu pendidikan di masyarakat diharapkan dapat membantu menurunkan ketimpangan pendapatan dengan memberi peluang bagi individu untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan langkah krusial dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Pendidikan yang berkualitas membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan serta memperjuangkan hak-hak ekonomi yang adil bagi semua (Ramadanti *et al.*, 2023).

Denisha *et al.* (2024) mengemukakan bahwa rata-rata lama pendidikan memiliki dampak positif terhadap ketimpangan pendapatan akibat efek komposisi. Semakin banyak individu yang mencapai tingkat pendidikan tinggi, semakin terdidik dan kompetitif masyarakat tersebut. Akibatnya, perusahaan cenderung menawarkan upah yang lebih tinggi dan memadai kepada tenaga kerja dengan pendidikan tinggi, dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan rendah. Hal ini, pada akhirnya, berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan pendapatan.

2.3. Tinjauan Empiris

Menurut Humaira (2024) menganalisis pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terhadap distribusi pendapatan di Indonesia, dengan data dari 34 provinsi pada tahun 2016 dan 2021. Menggunakan metode analisis regresi spasial, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016, tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan. Namun, pada tahun 2021, IPM dan tingkat pengangguran ditemukan memiliki pengaruh signifikan. IPM berpengaruh positif, menunjukkan bahwa peningkatan IPM justru meningkatkan ketidakmerataan pendapatan. Sebaliknya, tingkat pengangguran memiliki

pengaruh negatif, menandakan bahwa peningkatan pengangguran cenderung meningkatkan ketidakmerataan. Laju pertumbuhan ekonomi tidak signifikan di tahun tersebut.

Menurut Raihan & Dwi (2024) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Jawa Timur dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB per kapita dan indeks kesehatan. Pertumbuhan PDRB per kapita dan indeks kesehatan berpengaruh terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita adalah akumulasi modal dan indeks pendidikan, yang keduanya memiliki dampak positif. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan antar sektor di berbagai daerah di Jawa Timur, serta peningkatan kesehatan bagi kelompok berpenghasilan rendah, sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan.

Menurut Wibowo & Pangesty (2023) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap Gini ratio. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi PDRB suatu wilayah, tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya cenderung meningkat. Hal ini berarti wilayah dengan PDRB yang lebih tinggi cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata atau lebih adil dibandingkan daerah yang PDRB cenderung rendah.

Menurut Firdaus & Indira Hasmarini (2023) Berdasarkan analisis, ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2015-2022 dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten, dan jumlah penduduk. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali perlu meningkatkan berbagai aspek guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan menekan ketimpangan pendapatan. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pengawasan sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak, serta upaya menurunkan pengangguran agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan ketimpangan pendapatan dapat ditekan.

Menurut Salsabila & Pramukty (2023) menganalisis Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

indeks pembangunan manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Investasi yang lebih dapat mengurangi ketimpangan, sementara IPM yang lebih baik, mencakup

aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita, juga membantu menekan ketimpangan.

Menurut Nurfifah *et al.* (2022) menganalisis tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Ketimpangan Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Utara, hasil penelitian menunjukkan Hasil regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan, variabel investasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi dan investasi secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan Kota-kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Silalahi *et al.*, (Silalahi, Sitorus, et al., 2024) menganalisis pengaruh dari variabel independen yaitu jumlah penduduk yang bekerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependen-nya yaitu ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, variabel penduduk yang bekerja berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Effendy & Djohan (2022) Mengevaluasi pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Investasi swasta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk yang bekerja secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

stary *et al.* (2024) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, upah minimum provinsi (UMP) dan inflasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial semua variabel berpengaruh signifikan terhadap

ketimpangan pendapatan di Indonesia, dimana variabel investasi, UMP dan inflasi berpengaruh positif, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif. Secara simultan semua variabel bebas berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan nilai determinasi 83,7%.

Rohmah & Fitrianto (2024) menganalisis interaksi spasial antarkecamatan di Kabupaten Sidoarjo dan mengidentifikasi kecamatan yang potensial sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan wilayah perkotaan, diantaranya termasuk faktor lokasi dan pertumbuhan penduduk. Studi menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk dapat memengaruhi pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, meskipun dampaknya dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi lokal. Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah peri-urban mengalami pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh efek pertumbuhan ekonomi dari wilayah sekitarnya yang disebut *spread effect*. Meskipun demikian, peningkatan perekonomian juga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan Rasio Gini.